



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN**

## **SKRIPSI**



**DICKY FAUZAN AGUS**  
**07 153 090**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**



No. Alumni Universitas:

**DICKY FAUZAN AGUS**

No. Alumni Fakultas:

**a)** Tempat/Tgl Lahir : Padang / 03 Januari 1990 **b)** Nama Orang Tua : Azhar Agus, SE dan Miswarni M, SE **c)** Fakultas : Ekonomi **d)** Jurusan : Akuntansi **e)** No.BP : 07153090 **f)** Tgl Lulus : 30 Januari 2012 **g)** Predikat Lulus : Sangat Memuaskan **h)** IPK : 3,11 **i)** Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan **j)** Alamat Orang Tua : Komp Palimo Indah Blok J No. 2 Kec.Pauh, Padang

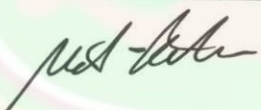
**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP KETERLAMBATAN  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN**

Skripsi S1 Oleh: Dicky Fauzan Agus

Pembimbing : Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE. MBA, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan 15 perusahaan yang mengalami keterlambatan menurut pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010. Karakteristik komite audit yang diuji adalah independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit dan *financial expertise* komite audit. Sementara untuk keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan dari tanggal 1 Mei hingga tanggal penyampaiannya kepada BEI sesuai aturan Bapepam dan LK No. Kep-134/BL/2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan perusahaan yang *listing* di BEI berada dalam *range* 2 hari hingga 132 hari untuk 2 tahun periode observasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya jumlah pertemuan komite audit yang berpengaruh secara signifikan dan negatif sementara independensi dan *financial expertise* komite audit tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin banyak jumlah pertemuan yang dilakukan komite audit, baik dengan sesama anggota, manajemen, auditor internal, auditor eksternal maupun pihak-pihak yang dirasa perlu, hal ini akan dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen, sehingga keterlambatan dapat dikurangi atau bahkan dihindari.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 28 Desember 2011.  
Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE. MBA, Ak	Dr. H. Yuskar, SE. MA, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. H. Yuskar, SE. MA. Ak

NIP. 196009111986031001

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama : Tanda Tangan :
No. Alumni Fakultas :	Nama : Tanda Tangan :

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat memenuhi semua persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Universitas Andalas Padang dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN”**.

Penyelesaian skripsi ini pastinya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pula pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan dengan segala kerendahan hati, rasa terimakasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Azhar Agus, SE dan Miswarni M, SE selaku orang tua penulis yang selama ini telah memberikan dukungan baik moril maupun materil hingga menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas Padang serta Keluarga Besar Agus Lelo Sutan dan H. Marzuki Ali.
2. Lidya Amalia Agus, SE dan Dody Alvin Agus, SE sebagai kakak dan abang penulis yang menjadi panutan dan tempat penulis bertanya tentang kehidupan kampus maupun dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk lagu-lagu *Adele* yang selalu beliau sarankan kepada penulis sebagai penyemangat dalam penyelesain skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, S.E, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.



4. Bapak Dr. H. Yuskar, S.E, MA, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang sekaligus dosen pembimbing akademik serta dosen peelaah seminar skripsi penulis.
5. Bapak Drs. Riwayadi, MBA, Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
6. Bapak Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE. MBA, Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta kesabaran yang luar biasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Tidak lupa ilmu, *advice* dan kata-kata motivasi yang selalu bapak berikan buat penulis yang akan selalu penulis ingat dan laksanakan.
7. Ibu Dr. Yurniwati, SE. Msi, Ak dan Ibu Dra Sri Daryanti Zein, MBA, Ak selaku dosen penguji kompre, terimakasih untuk arahan dan nasehatnya agar penulis senantiasa selalu menjaga nama baik Jurusan Akuntansi.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang yang telah memberikan bekal pengetahuan selama dalam proses perkuliahan.
9. Staf Administrasi biro jurusan Akuntansi Mama Loli, Ni Eva dan Da Ari terimakasih atas semangat, bantuan dan kerjasamanya selama ini.
10. Bang Reno, Bang Alfian dan Ayu (Devika) yang menjadi *partner* dalam menyelesaikan skripsi ini bersama pembimbing kita tercinta, bersama-sama bertukar pikiran dan saling tolong menolong selama masa bimbingan sampai akhirnya kita ber-4 bisa wisuda bareng.
11. My Bro Bra yang mendorong penulis dari belakang, depan, kiri dan kanan selama masa kuliah hingga dalam pergaulan sehari-hari serta selalu menemani baik susah maupun senang. Terima kasih untuk belajar bersama di rumah semalam suntuk H-1 UTS atau



UAS. Bro Pinto, Bro Febby Arief, Bro Alta, Bro Raymon, Bro Ikhsan *U're Best friend I ever had and Best Friend Forever, u all rock guys !!*

12. Teman-teman *KFC Lovers* yang membantu selama masa penulisan skripsi sampai kompre dan terus hingga saat ini. Anne, Laura, Bichenk, Ica, Kachie, Binyok *thanks for everything especially that kinda weird language "maven de kaven de sihlen"*.
13. Sahabat-sahabat Akuntansi 07 mas bro dika, aulia, pipi, rere, opha, icyn, alleev dan semua teman-teman yang memberi warna warni dalam akuntansi 07.
14. Teman-teman 22. *Sanasib, Saraso.....!!*
15. Teman-teman KKN Kayu Tanam-Kapalo Hilalang khususnya Jorong Pasa Usang Danny, Dedet, Nanda, Iin dan Herni.
16. Teman-teman *Jingga Radio* khususnya *hedoners, thanks for ur support* Lebhay, Yuca, Eizzy, Buk Cepod, Buk Obie, Amy, Dynal, Kak Vo, Mochis dan semua *crew 95,9 FM*.
17. Kakak-kakak, Abang-abang dan adik-adik di Akuntansi UNAND yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak dan *move on !!*
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan dan pengetahuan yang terbatas yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis harapkan kekurangan itu dapat menjadi perbaikan untuk ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Padang, Februari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Pengertian Komite Audit.....	10
2.1.2 Komite Audit dan Corporate Governance.....	11
2.1.3 Struktur Komite Audit.....	12



2.1.4	Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	14
2.1.5	Independensi Komite Audit.....	17
2.1.6	Jumlah Pertemuan Komite Audit .....	18
2.1.7	<i>Financial Expertise</i> Komite Audit.....	20
2.1.8	Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan.....	21
2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
2.3	Kerangka Penelitian.....	25
2.4	Formulasi Hipotesis.....	26

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Design Penelitian.....	29
3.2	Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian.....	29
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4	Operasional Variabel Penelitian.....	31
3.5	Model Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Deskripsi Data.....	40
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	42
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	45
4.4	Pengujian Hipotesis.....	51
4.5	Pembahasan.....	57

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....65

5.2 Keterbatasan Penelitian.....66

5.3 Implikasi Penelitian.....67

DAFTAR PUSTAKA .....xiii

LAMPIRAN .....68





## DAFTAR GAMBAR

Gambar

4.1	Hasil Pengujian Normalitas.....	47
4.2	Hasil Pengujian Heterokedastisitas.....	51



## DAFTAR TABEL

### TABEL

4.1 Daftar Jumlah Hari Keterlambatan Sampel.....	41
4.2 Deskriptif Hasil Perhitungan Variabel Dependen .....	42
4.3 Kategori Tingkatan Keterlambatan Sampel.....	43
4.4 Deskriptif Hasil Perhitungan Variabel Independen.....	44
4.5 Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov.....	47
4.6 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	48
4.7 Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	49
4.8 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	53
4.9 Hasil Uji F.....	54
4.10 Hasil Uji t.....	55
4.11 Rangkuman Hasil Penelitian	





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1.	Data variabel independensi komite audit .....	68
2.	Data variabel jumlah pertemuan komite audit .....	69
3.	Data variabel <i>financial expertise</i> komite audit.....	70
4.	Hasil pengujian regresi- <i>descriptive statistics</i> keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.....	71
5.	Hasil pengujian regresi- <i>descriptive statistics</i> variabel independen (independensi, jumlah pertemuan dan <i>financial expertise</i> komite audit) .....	72
6.	Hasil Uji Kosmogrof-Smirnov .....	73
7.	Hasil Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas dan Uji R Square.....	74
8.	Hasil Uji F, Uji t.....	75
9.	<i>Chart</i> Uji Normalitas, Uji Heterskedastitas .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan, salah satu unsur yang bisa menjamin berfungsinya *corporate governance* itu adalah dengan adanya komite audit (*audit committee*). Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) fungsi komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang laporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pengawasan perusahaan (*corporate control*). Pengawasan dan proses audit menjadi bagian penting dalam penegakan *Corporate Governance*, sesuai dengan prinsip *transparency* atau keterbukaan informasi. Pembentukan komite audit ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari proses audit oleh *senior executives* dan menyediakan jembatan penghubungan antara auditor eksternal dengan dewan komisaris (Tricker, 2010).

Komite audit dapat memberikan kontribusi secara signifikan yang berdampak pada perubahan *corporate governance* perusahaan dan menambah nilai bagi pemegang saham (Prasad, 2006). Komite audit juga menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan, karena dalam membuat laporan keuangan komite audit juga diikutsertakan. Sehingga komite audit dituntut harus menguasai akuntansi atau bidang keuangan agar dalam membuat laporan keuangan dapat dimonitoring. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Eksistensi komite audit terkait erat dengan penegakan *Corporate Governance* dan menjadi tolak ukur,



apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan *Corporate Governance* secara efektif atau belum.

Anggota komite audit perlu mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk *Audit Committee Charter* yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan merupakan dokumen yang menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan suatu perusahaan (FCGI, 2001). Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/ PM/ 2004 dinyatakan tentang tugas dan tanggung jawab komite audit yang tertera pada *Audit Committee Charter* perusahaan antara lain meliputi melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan, melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta melaporkan kepada Komisaris tentang berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.

Mengingat pentingnya keberadaan komite audit ini maka negara-negara lain di dunia sudah lebih dahulu dalam penerapan komite audit. Misalnya di Negara Amerika Serikat, peraturan yang mewajibkan dibentuknya komite audit antara lain *Accounting Series Release* (ASR) No.19/1940 dari *The Securities Exchange Commission (SEC)*. Ketentuan tersebut menganjurkan agar perusahaan yang telah masuk Pasar Modal (*go public*) memiliki komite audit yang beranggotakan pihak independen dari luar. Sementara di Inggris, komite audit malah sudah ada sejak pertengahan abad ke-19 yang anggotanya dipilih diantara para pemegang saham (*shareholders*) yang dipandang memiliki keahlian (kompetensi) di bidang akuntansi dan auditing.

Kewajiban bagi setiap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki Komite Audit dalam rangka penyelenggaraan *corporate governance* terdapat pada Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002. Dimana dijelaskan bahwa Komite Audit terdiri dari sedikitnya 3 orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan 2 orang eksternal. Komite Audit ini harus secara independen dan profesional memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam hal menilai dan mengidentifikasikan hal-hal yang menyangkut laporan keuangan dengan berbagai pertimbangan risiko yang ada.

Selanjutnya pada LK-Bapepam No.Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, diatur tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kinerja Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan memiliki pedoman kerja Komite Audit (*audit committee charter*). Dari beberapa tugas dan tanggung jawab Komite Audit, salah satu yang penting dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya Purwati (2006) menyatakan bahwa Komite Audit harus ikut memastikan prinsip-prinsip *corporate governance* yang berkaitan dengan transparansi dan *disclosure*. Penetapan prinsip ini berkaitan dengan integritas laporan keuangan perusahaan dimana nantinya tidak ada permasalahan dalam isi dan penyajian laporan keuangan tersebut serta selalu menyampaikan informasi kejadian yang dianggap berpengaruh terhadap jalannya Perseroan kepada otoritas bursa dan kepada masyarakat secara tepat waktu dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami.

Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2009) laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi



sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan antara lain investor, manajemen, dan pemerintah, serta masyarakat sebagai *potential* investor. Khusus bagi investor, laporan keuangan berguna untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi mereka. Sehingga sangat diperlukan prinsip *transparency* atau keterbukaan informasi tadi dalam pasar modal. Perusahaan yang *go public* wajib menyampaikan laporan berkala dan informasi material lainnya ke Bursa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan merujuk dari ketentuan III.2 Peraturan Nomor I-E : Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Laporan Tahunan ke Bursa.

Dalam Lampiran Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 dinyatakan bahwa suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Rentang waktu penerbitan laporan keuangan merupakan kendala atas relevansi dan keandalan suatu informasi pada laporan keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009 menyatakan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ditegaskan juga dalam PSAK No. 1 paragraf 38 bahwa manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut mengalami keterlambatan. Suatu laporan keuangan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian, maka dikhawatirkan informasi tersebut sudah tidak *up to date* sehingga akan mengurangi nilai



tambahnya bagi para pengguna informasi laporan keuangan tersebut khususnya bagi investor atau pemegang saham.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan pada awalnya diatur dalam undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar (*listing*) dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bursa dan mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya melalui Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib disampaikan selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Kemudian diperkuat dengan adanya peraturan Bapepam No. X. K.2 yang menjelaskan apabila perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun sudah ditetapkan aturan dan sanksi tersebut, tetap saja masih ada perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya. Sanksi terberat yang pernah diterapkan misalnya pada Pasar Modal Australia pada tahun 1974 pernah terjadi 38 perusahaan sahamnya telah dilarang diperdagangkan karena gagal memberikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan persyaratan ketepatan waktu bagi bursa.

Pentingnya mengkaji mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan telah menjadi hal yang signifikan untuk diteliti. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) saja bahwa pada tahun 2009 sebanyak 56 (lima puluh enam) perusahaan tercatat yang terlambat dari aturan Bapepam, bahkan 19 diantaranya belum menyampaikan laporan tahunan hingga tanggal 2 Juni 2010. Sementara pada tahun 2010 malah ada peningkatan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan, dimana tercatat sebanyak 60 perusahaan tercatat hingga batas yang ditentukan yakni 30 April 2011 belum menyampaikan laporan keuangan perusahaan tahun

2010. Padahal komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam hal proses pelaporan keuangan dan kepatuhan aturan bursa dan undang-undang lainnya. Maka penelitian ini akan melihat seberapa efektif keberadaan komite audit terhadap mitigasi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepan No. Kep-29/PM/2004 dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab komite audit yakni melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, penelaahan terhadap kepatuhan perusahaan pada peraturan di bidang pasar modal dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, serta melakukan *review* terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Komite audit akan meningkatkan proses pelaporan keuangan apabila anggota-anggotanya independen, paham laporan keuangan, memberikan waktu yang cukup dan mengadakan rapat secara teratur (*The Blue Ribbon Committee*, 1999). Melalui karakteristik Komite Audit berupa independensi, pertemuan dan *financial expertise* yang baik diharapkan akan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan keterlambatan perusahaan penyampaian laporan keuangan tahunannya sehingga semakin tinggi tingkat independensi komite audit, semakin sering melakukan pertemuan dan semakin banyak anggota komite audit yang mempunyai *financial expertise* akan mengurangi jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Atiek (2006), yang menggunakan data pada seluruh perusahaan publik yang terdaftar di BEI, menemukan bahwa karakteristik komite audit memiliki hubungan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dimana semakin besar variabel keanggotaan komite audit, independen anggota komite



audit, ketua komite audit dan keberadaan *financial expert* maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Periode pengamatan yakni pada tahun 2004 dan mengambil sampel sebanyak 140 perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Rashidah (2010) yang menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Dimana waktu keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagai variabel dependen dan *independence*, *diligence* dan *expertise* komite audit sebagai variabel independen, serta menggunakan *size* atau ukuran perusahaan, *audit type* dan *profitability* sebagai variabel kontrol yang diduga memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Dengan sampel 288 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *independency* dan *expertise* komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Sementara *diligence* komite audit yang diukur dari jumlah rapat anggota, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Studi ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya dan menginvestigasi pengaruh antara karakteristik komite audit yang berupa independensi, jumlah pertemuan atau *meeting*, dan *financial expertise* komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya untuk selanjutnya dilihat apakah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan telah efektif dalam mitigasi terhadap keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut. Perusahaan yang diteliti dalam studi ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan tahunan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga akan



diteliti apakah komite audit perusahaan mempunyai korelasi dalam keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya perlu diteliti tentang Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan?
2. Apakah jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan?
3. Apakah komposisi *financial expertise* dalam jajaran komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pertemuan komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh *financial expertise* komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai karakteristik komite audit dan pengaruhnya terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi pengembangan kajian mengenai karakteristik komite audit dan pengaruhnya terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

### 1.4.2 Secara Praktis

#### 1. Bagi Investor

Memberikan informasi mengenai rata-rata keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi.

#### 2. Bagi Bapepam-LK dan BEI

Memberikan data lebih lanjut tentang berapa rata-rata keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

#### 3. Bagi Perusahaan

Memacu perusahaan untuk lebih mempercepat proses penyampaian laporan keuangan tahunannya dan meningkatkan efektifitas komite audit perusahaan sehingga perusahaan tidak dirugikan akan adanya keterlambatan tersebut.



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Komite Audit

Konsep komite audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, *New York Stock Exchange* (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak saat itu banyak Negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecendrungan internasional tersebut, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004). Antonius (2006) menjelaskan bahwa pembentukan komite audit bukan sekedar suatu kepatuhan terhadap ketentuan tetapi suatu bentuk kesadaran akan pentingnya pengawasan yang bersifat independen dan profesional, karena komite audit harus dapat membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.

Komite audit adalah beberapa orang yang dipilih dan melakukan tugas-tugas sejumlah anggota dewan komisaris dimana bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, termasuk membantu auditor eksternal agar tetap independen dari manajemen (Tugiman, 1995). Kemudian pengertian komite audit ini disempurnakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yaitu sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien, yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya.



*Pricewaterhouse Coopers* (2000) menjelaskan bahwa komite audit mengacu kepada tubuh *corporate governance* yang diberi tambahan dengan pengawasan terhadap audit perusahaan dan fungsi kontrol serta *compliance* perusahaan. Berdasarkan Keputusan Direksi BEJ No. kep-315/BEJ/06/2000 dinyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa komite audit itu adalah sebuah organ atau suatu unsur kelembagaan dalam konsep *corporate governance* yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dalam pengawasan terhadap laporan keuangan serta kepatuhan terhadap prinsip *corporate governance* dan aturan bursa serta peraturan yang berlaku lainnya.

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.

### **2.1.2 Komite Audit dan Corporate Governance**

Komite audit adalah organ tambahan atau pendukung dari suatu perusahaan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dimana merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan

Komisaris dengan salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk memastikan prinsip-prinsip *Corporate Governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh manajemen (Surya, 2006). Komite audit ini diharapkan bisa mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*Independency, transparency, accountability, and responsibility, and fairness*) pada korporasi yang bersangkutan (Agustin, 2005). Dalam ruang lingkup *Corporate Governance*, tanggung jawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan dengan usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antar pekerja dan kesalahan (*fraud*).

Penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan merupakan tanggung jawab semua organ perusahaan terutama Dewan Komisaris (Trihapsari, 2006). Komite audit sebagai komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam *financial reporting* perusahaan dituntut untuk memiliki independensi dan kompetensi. Dalam *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKCG dan peraturan pencatatan BEJ, dinyatakan bahwa komite audit harus bersikap independen dan bertanggungjawab penuh terhadap dewan komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance*.

### 2.1.3 Struktur Komite Audit

Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Kep. Men.117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik terdapat dalam Keputusan BEI dan Peraturan BAPEPAM. Menurut Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004, tertulis bahwa struktur komite audit dalam pedoman pembentukan komite audit adalah sebagai berikut :



1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Sementara untuk persyaratan lebih lanjut untuk menjadi anggota komite audit dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/ PM/ 2004 dijelaskan sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman, yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau , mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan



Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;

7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain;
8. Tidak mempunyai :
  - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
  - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Maka pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/ PM/ 2004 pada tanggal 24 September 2004 dinyatakan bahwa komite audit harus memiliki independensi dengan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, serta *financial expertise* yakni dengan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan.

#### **2.1.4 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Peran dan tanggung jawab komite audit harus jelas tercantum pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dimana piagam komite yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Anggarini, 2010). Bentuk, isi dan fokus dalam piagam komite audit dari satu perusahaan ke

perusahaan lainnya dapat berlainan, tergantung kondisi perusahaan tersebut. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Dengan piagam komite audit ini, maka akan mengarah kepada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang *internal control* dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Pada Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif yang disusun oleh Komite Nasional Good Corporate Governance pada tanggal 30 Mei 2002 dinyatakan bahwa peran dan tanggung jawab komite audit antara lain :

a. Pelaporan keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah :

1. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi,
2. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut, dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit, dan
3. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

b. Manajemen risiko dan control

Dalam hal manajemen risiko dan control, peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah :

1. Mengawasi proses manajemen risiko dan control, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi control untuk mengecilkan risiko tersebut,



2. Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan control diperhatikan,
3. Menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan control, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

c. Corporate Governance

Dalam hal Corporate Governance peran dan tanggungjawab Komite Audit harus termasuk juga :

1. Mengawasi proses Corporate Governance,
2. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan Corporate Governance,
3. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan,
4. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku khususnya aturan Bursa bagi perusahaan publik,
5. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan Corporate Governance dan temuan lainnya.

Peran dan tanggung jawab Komite Audit untuk memastikan pelaporan keuangan yang dilakukan manajemen sudah sesuai standar, dan memastikan bahwa perusahaan telah patuh dengan aturan Pasar Modal serta memastikan potensi resiko dan control perusahaan ini memiliki hubungan dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan

Kemudian Bapepam (2000) juga menyatakan bahwa komite audit bertanggung jawab untuk :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, serta informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.

Maka bisa diambil kesimpulan bahwa komite audit yang efektif adalah komite audit yang telah memenuhi peran dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris, diantaranya memastikan jalannya perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebagai wujud dari penerapan prinsip *Corporate Governance* yaitu *responsibility*. Kemudian komite audit juga harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap bentrokan kepentingan dan kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan, serta telah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

#### 2.1.5 Independensi Komite Audit

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak independen. Secara harfiah pengertian independensi anggota komite audit ini adalah bahwa keberadaannya tidak mewakili pihak manapun atau dapat dikatakan mewakili diri mereka sendiri. Surat Edaran Bapepam Nomor : SE-



008/BEJ/12-2001 menyatakan bahwa kepercayaan atas sikap independensi komite audit sangatlah penting dimana untuk diakui sebagai pihak independen, anggota komite audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada Perusahaan Tercatat atau tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap Perusahaan Tercatat atau Direksi atau Komisaris serta bebas dari keadaan yang menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Independensi komite audit ini tidak dapat dipisahkan dari moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara auditor eksternal dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan auditor internal. Alasan lain perlunya independensi ini adalah untuk memelihara integritasnya serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit (Anggarini, 2010).

Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 bahwa syarat pembentukan komite audit adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik selain 1 orang adalah Komisaris Independen, maka minimal 3 orang komite audit harus berasal dari pihak ekstern perusahaan termasuk ketua komite audit yang merupakan komisaris independen perusahaan. Independensi ini akan terlihat dari bagaimana komite audit tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu sehingga bebas memberikan pendapat dalam rangka tugasnya membantu dewan komisaris perusahaan.

#### **2.1.6 Jumlah Pertemuan Komite Audit**

Komite audit sebagai komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantunya dan sekaligus sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, manajemen, internal auditor, dan

eksternal auditor. Agar menjadi efektif, komite audit harus memelihara komunikasi yang terus menerus baik dengan manajemen, internal auditor, maupun dengan eksternal auditor. Rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh anggota komite audit nantinya adalah sebuah media agar komite audit dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang dirasa perlu. Hal ini juga tercantum dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, dimana komite audit mengadakan pertemuan secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan (Anggarini, 2010).

Pertemuan komite audit ini berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan lainnya (Putra, 2010). Menurut Sutaryo (2010) frekuensi pertemuan komite audit ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni ukuran perusahaan, leverage, *growth* atau pertumbuhan perusahaan, kepemilikan saham oleh manajemen dan institusional, serta kualitas auditor eksternal.

Secara umum Effendi (2002) menyimpulkan beberapa hal-hal yang harus dikomunikasikan dalam pertemuan anggota komite audit adalah sebagai berikut :

1. Tugas yang diberikan oleh dewan komisaris;
2. Kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen;
3. Ketidaksepakatan antara auditor eksternal dengan manajemen;
4. Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi;



5. Dan kesulitan yang ditemui oleh auditor eksternal atau akuntan publik dalam pelaksanaan audit.

Maka untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Komite Audit dituntut untuk melakukan komunikasi dengan dewan komisaris, manajemen, auditor eksternal, auditor internal maupun dengan pihak-pihak yang dianggap perlu. Dengan adanya komunikasi formal berupa pertemuan atau rapat tersebut maka menjamin proses audit internal, eksternal dan meningkatkan akurasi penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

#### **2.1.7 *Financial Expertise* Komite Audit**

Anggarini (2010) menyatakan bahwa *financial expertise* adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit, keuangan dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. *Financial expertise* ini akan menunjukkan tingkatan pemahaman dan pengetahuan anggota komite audit terhadap bidang akuntansi maupun keuangan yang memungkinkan komite audit melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Definisi *financial expertise* dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman dalam bidang auditing (Masrurroh, 2010). New York Stock Exchange (NYSE) dalam standarnya juga mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan sehingga lebih memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya.

*The Sarbanas Oxley Act section 407 (2003)* yang dirilis oleh *Securitie and Exchange Commission (SEC)* menjelaskan tentang kriteria *financial expertise* adalah dengan telah memperoleh atribut sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang GAAP ( *Generally Accepted Accounting Principles* ) dan laporan keuangan;
2. Kemampuan untuk menilai aplikasi umum dari prinsip-prinsip sehubungan dengan perkiraan akuntansi yang dipakai manajemen;
3. Pengalaman dalam mempersiapkan, mengaudit, menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan serta melakukan pengawasan dalam kegiatan tersebut;
4. Pemahaman tentang *internal control* atau pengendalian internal dan prosedur dari pelaporan keuangan;
5. Pemahaman tentang fungsi komite audit itu sendiri.

Sementara berdasarkan aturan Bapepam melalui Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, *financial expertise* ini diartikan sebagai adanya latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi atau keuangan sehingga memahami tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan serta mampu membaca dan menganalisa laporan keuangan. Berdasarkan aturan Bapepam tersebut diwajibkan sekurang-kurangnya salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan secara formal.

#### **2.1.8 Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan**

Menurut IAI (2007) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang



bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Menurut Hendriksen (1992) ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat peramalan (*forecast*) dan keputusan. Penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan tepat waktu ini juga relevan dengan prinsip dalam *Corporate Governance* yakni prinsip transparansi, bahwa dengan penyampaian informasi yang lengkap, jelas dan akurat serta tepat pada waktunya dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara *agent* dan *principal* (Trihapsari, 2006).

Pentingnya penyampaian laporan keuangan agar tidak mengalami keterlambatan adalah karena akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan itu sendiri. Dengan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat tidak baru atau sudah *out of date*. Sehingga dapat menunda para investor atau calon investor untuk melakukan transaksi. Hal ini pada akhirnya menjadi segmen negatif bagi perusahaan di pasar modal.

Setiap perusahaan yang *listing* di BEI wajib melakukan pelaporan ke bursa sebagaimana yang tertulis pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-134/BL/2006 pada tanggal 7 Desember 2006 pada Peraturan X.K.6, bahwa setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahun kepada Bursa selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Disini juga tertulis bahwa laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan IAI serta wajib diaudit oleh Akuntan

Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Dengan demikian batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bursa adalah 30 April dan keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan dinyatakan jika telah melewati batas waktu yang ditetapkan tersebut.

Mengingat pentingnya pelaporan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik ini, maka bagi perusahaan yang terlambat dari aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bapepam akan dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.Kep-307/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa terhadap pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis I;
2. Peringatan tertulis II;
3. Peringatan tertulis III;
4. Denda, setinggi-tingginya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
5. Penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspense) di Bursa.

Ketepatan waktu ini adalah elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai, karena itu keterlambatan pelaporan dapat berakibat buruk bagi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya pernah terjadi di pasar modal Australia pada tahun 1974 dimana 38 perusahaan yang gagal menyampaikan laporan keuangan sesuai persyaratan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku, akhirnya dilakukan larangan terhadap perdagangan sahamnya. Maka bisa dilihat bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan itu sangat penting bagi perusahaan.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Atiek (2006) melakukan penelitian terhadap karakteristik komite audit dan pengaruhnya terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dimana sampelnya adalah seluruh perusahaan publik yang *listing* di BEJ. Penelitian tersebut menguji secara empiris, apakah keanggotaan komite audit, independensi anggota komite audit, proporsi komisaris independen, ketua komite audit serta kompetensi anggota komite audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang *listing* di BEJ. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah bahwa dari 5 variabel yang diuji, hanya keahlian keuangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaannya, sementara variabel keanggotaan komite audit, independensi, proporsi komisaris independen dan ketua komite audit didapatkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya..

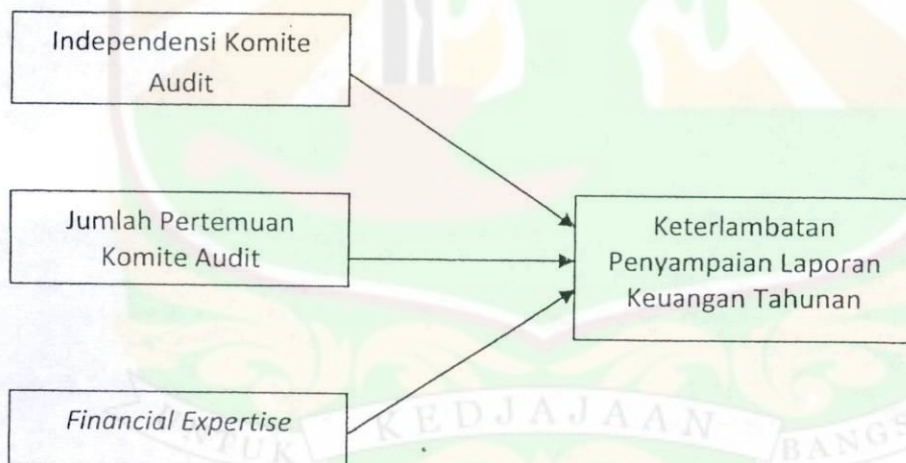
Penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dilakukan oleh Dwiyantri (2010). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa profitabilitas dan struktur kepemilikan secara signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan *debt to equity ratio*, kualitas auditor, dan pergantian auditor tidak berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian terakhir yang menjadi acuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian tentang *audit report lag and the effectiveness of audit committee* yang dilakukan oleh Umami & Rashidah (2010). Penelitian ini menguji 288 perusahaan yang *listing* di Bursa Malaysia selama 3 tahun yakni dari 2007 hingga 2009. Dimana karakteristik komite audit pada penelitian ini yaitu *independency*, *diligence*, dan *expertise* komite audit. Hasil yang didapat menunjukkan

hanya *independency* dan *expertise* komite audit yang memiliki hubungan dengan *audit report lag* atau keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan, sedangkan *diligence* atau jumlah pertemuan anggota komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaannya.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, karakteristik komite audit yang digunakan yaitu independensi komite audit, jumlah pertemuan anggota komite audit, dan *financial expertise* komite audit. Ketiga karakteristik tersebut adalah faktor penentu efektivitas kinerja mereka yang memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan negatif tersebut, dibuat sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian sebagai berikut :





## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Independensi Komite Audit

*The Blue Ribbon Committee (1999)* merekomendasikan bahwa komite audit yang lebih independen diharapkan akan meningkatkan pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan. Komite audit yang independen akan lebih baik dalam hal perlindungan *reliabilitas* proses akuntansi dan memajukan objektivitas dari komite audit. Hal ini akan memperkuat pengendalian internal dan mengarah kepada berkurangnya risiko pengendalian sehingga akan memperkecil pengujian substantif terhadap pihak auditor eksternal.

Umami dan Rashidah (2010) menyimpulkan berdasarkan pembahasannya bahwa variabel independensi komite audit berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, dimana dinyatakan bahwa independensi komite audit merupakan faktor penting dalam pengaruhnya terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Independensi komite audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

### 2.4.2 Jumlah Pertemuan Komite Audit

Pada September 1998, Arthur Levitt, *Chairman the US Securities Exchange Commission (SEC)*, mengumumkan seperangkat inisiatif (*The Levitt Initiatives*) yang diharapkan akan meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan, dimana salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan efektivitas komite audit adalah dengan bersikap kritis. Komite audit yang kritis akan menjadi pelindung handal bagi kepentingan publik dengan melakukan rapat atau

pertemuan baik sesama anggota maupun dengan dewan komisaris, pihak manajemen, internal auditor dan eksternal auditor serta pihak-pihak yang dirasa perlu. Dalam piagam komite audit sebagai kerangka fungsional, juga dinyatakan adanya rapat dan pertemuan sebagai salah satu kewajiban komite audit..

Putri (2011) mendapatkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah pertemuan atau rapat komite audit terhadap efektivitas komite audit, sehingga semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen, dimana salah satunya terhadap kepatuhan terhadap aturan bursa dan hukum lainnya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin sering komite audit melakukan pertemuan, baik sesama anggota maupun dengan pihak lain, maka akan semakin kecil tingkat keterlambatan perusahaan dalam melakukan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan Berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

H2 : Jumlah pertemuan anggota komite audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

#### **2.4.3 Besarnya *Financial Expertise* Komite Audit**

Komite Nasional *Good Corporate Governance* (2002) menyatakan peran dan tanggungjawab komite audit salah satunya adalah dalam pengawasan atas pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi. Maka pada Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 dinyatakan bahwa persyaratan anggota komite audit yakni salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan ini akan memberikan dasar



yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan (Anggarini, 2010).

Proporsi atau besarnya anggota komite audit yang merupakan ahli di bidang akuntansi atau keuangan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Perusahaan cenderung diidentifikasi memiliki *internal control* yang lemah jika memiliki sedikit *financial expertise* pada komite audit yang dimilikinya, terutama *accounting financial expertise* (Zhang dan Zhou, 2007). Maka dari kesimpulan penelitian tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya *financial expertise* pada anggota komite audit akan lebih memberikan pengawasan *internal control* terhadap perusahaan termasuk nantinya kepatuhan perusahaan terhadap aturan bursa dan aturan hukum lainnya. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

H3 : *Financial expertise* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Design Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif, dimana menurut Arikunto (1998) penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk dilihat pengaruh karakteristik komite audit perusahaan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut.

Obyek penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut selama tahun 2009 dan 2010. Variabel-variabel yang akan diuji diantaranya terdiri dari variabel dependen (keterlambatan penyampaian laporan keuangan) dan variabel-variabel independen (independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan *financial expertise* komite audit).

#### 3.2 Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki (Sekaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunannya berturut-turut pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji



pengaruh karakteristik komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *non-probability sampling* berdasarkan kriteria tertentu (*judgement sampling*). *Judgement sampling* ini didapat dari asumsi dan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yang memungkinkan untuk memilih elemen yang mewakili sampel yang diinginkan dari perkiraan target populasi (Ross, 2005).

Adapun kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut :

- 1) Perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- 2) Masuk ke dalam kategori perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan secara berturut-turut pada tahun 2009 dan 2010 sesuai dengan Pengumuman pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 3) Menerbitkan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan selama tahun 2009 dan 2010.
- 4) Mempunyai periode pelaporan keuangan berdasarkan pada tahun kalender yang berakhir tanggal 31 Desember.
- 5) Memiliki data yang lengkap tentang komite audit pada laporan tahunan perusahaan.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder tersebut meliputi data tentang nama perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit dan data tentang komite audit. Data-data yang diperlukan

dalam penelitian ini diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website masing-masing perusahaan sampel.

### 3.4 Variabel Penelitian

#### 1. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel terikat atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini mendefinisikan keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ummi dan Rashidah (2010) dimana mengukur keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan sebagai jumlah hari setelah batas penyampaian laporan keuangan yang telah ditetapkan hingga penyampaian ke Bursa. Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-134/BL/2006 pada tanggal 7 Desember 2006 pada Peraturan X.K.6, dinyatakan bahwa setiap Emiten atau Perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. **Maka Variabel keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan pada penelitian ini diukur secara numerik dimana dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan dari tanggal 1 mei hingga tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut.**

#### 2. Variabel independen (X)

##### a. Independensi Komite Audit

Independensi adalah suatu sikap mental yang sulit dikendalikan karena berhubungan dengan integritas seseorang. Independensi ini bertujuan untuk memelihara integritas serta



pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Peraturan BEI dan ketentuan pedoman *Corporate Governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit terdiri tidak kurang dari tiga anggota yang mayoritas independen. Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM.2004 pada poin 2 pada pembentukan komite audit, yang menyatakan bahwa minimal harus ada 2 orang anggota komite audit yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan ditambah satu orang Komisaris Independen sebagai ketua komite audit. Maka menurut ketentuan Bapepam semua anggota komite audit disyaratkan tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan atau berada dari luar emiten karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. **Variabel independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase antara anggota yang independen menurut ketentuan BAPEPAM terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.**

$$\frac{\text{anggota komite audit yang independen menurut ketentuan BAPEPAM}}{\text{jumlah seluruh anggota komite audit}} \times 100\%$$

b. Jumlah Pertemuan Komite Audit

Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pemantauan atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *corporate governance* dan aturan Bursa memerlukan pertemuan yang rutin. Jumlah pertemuan anggota komite audit diukur berdasarkan berapa kali komite audit melakukan rapat dalam 1 (satu) tahun. Rapat dan pertemuan komite audit dilakukan baik dengan sesama anggota audit atau dengan pihak-pihak

luar, antara lain dengan komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan auditor eksternal.

Komite audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Komite Audit oleh Bapepam menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Maka bisa dikatakan menurut aturan Bapepam jumlah pertemuan komite audit dalam 1 tahun adalah minimal sebanyak 4 (empat) kali. **Variabel jumlah pertemuan komite audit pada penelitian ini diukur secara numerik, yaitu dihitung dari jumlah nominal pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam tahun berjalan.**

*c. Financial Expertise komite audit*

*Financial expertise* atau kompetensi ini adalah kemampuan harus yang dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan (Atiek, 2006). Persyaratan keanggotaan komite audit menurut Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 yaitu antara lain memiliki pengetahuan untuk memahami laporan keuangan dimana dinyatakan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi atau keuangan.

*Securities and Exchange Commission* (2003) memberikan kriteria *financial expertise* komite audit dapat dilihat dari adanya pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau dalam audit atas laporan keuangan perusahaan, serta pemahaman terhadap GAAP, *internal control*, dan estimasi akuntansi. Maka untuk mengukur *financial expertise* komite audit dapat dilihat dari profil komite audit dengan adanya pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, *Certified Fraud Accountant* (CFO), *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis serta adanya latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan secara formal. **Variabel *financial expertise* komite audit pada penelitian ini diukur dari proporsi besarnya**



jumlah anggota komite yang merupakan *financial expertise* terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan.

$$\frac{\text{komite audit yang mempunyai } \textit{financial expertise}}{\text{komite audit keseluruhan}}$$

3.5 Model Analisis Data

Regresi berganda (*multiple regression*) digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda dihasilkan dengan cara memasukkan input data variabel ke fungsi regresi. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Priyatno, 2010). Analisis ini digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit dan *financial expertise* mempengaruhi waktu pelaporan keuangan.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$LAG = \alpha + \beta1INDEPENDENCE + \beta2MEETING + \beta3FINANCIAL + \varepsilon$$

Di mana :

- LAG

= Keterlambatan penyampaian laporan keuangan
- $\alpha$

= Konstanta
- $\beta1INDEPENDENCE$

= Independensi komite audit
- $\beta2MEETING$

= Jumlah pertemuan anggota komite audit
- $\beta3FINANCIAL$

= *Financial expertise* komite audit
- $\varepsilon$

= Error term

### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Statistik deskriptif akan menginformasikan nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi, dan menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak (Wijaya, 2011). Statistik deskriptif yang dilakukan adalah mengidentifikasi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dengan menghitung hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan mengukur nilai rata-ratanya, maksimum, minimum, dan standar deviasinya. Pada statistik deskriptif nanti juga akan terlihat pembagian variabel dependen penelitian, yakni keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunannya ke dalam kategori tingkatan low, medium dan high. Statistik deskriptif ini berfungsi untuk melihat bagaimana karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian.

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data secara statistik menggunakan *modification of kosmogrov-smirnov test*. Apabila nilai sig (*2-tailed*) lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Jika nilai sig (*2-tailed*) kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Disamping itu, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan cara melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode selanjutnya dengan melihat normal *probability plot*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.



Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Autokorelasi

Autokorelasi atau korelasi serial diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota observasi yang terletak berderetan (jika datanya *time series*) atau korelasi antara tempat yang berdekatan (jika datanya *cross sectional*). Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin Watson* dari program SPSS. Jika nilai *Durbin Watson* di antara batas atas ( $d_u$ ) dan batas atas ( $4-d_u$ ), maka tidak ada autokorelasi (Priyatno, 2010). Ketentuan tentang model pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW) adalah sebagai berikut :

$0 < \text{nilai DW} < d_l$	= ada autokorelasi positif
$d_l \leq \text{nilai DW} \leq d_u$	= tidak ada autokorelasi positif
$d_u < \text{nilai DW} < 4-d_u$	= tidak ada autokorelasi
$4-d_u \leq d \leq 4-d_l$	= tidak ada korelasi negatif
$4-d_l < \text{nilai DW} < 4$	= ada korelasi negatif

### 3. Multikolenieritas

Multikolenieritas menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Metode untuk menguji multikolenieritas dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Menurut *hair et al* batas *tolerance value* adalah 0,10 dan *variance inflation factor* (VIF) adalah 10, jika nilai *tolerance value* di atas 0,1 atau *variance inflation value* (VIF) di bawah 10 maka tidak terjadi multikolenieritas. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolenieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya.

### 4. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah menggunakan grafik plot antara nilai terikat (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang teratur di dalam grafik scatterplot antara SRESIS dengan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residunya. Jika ada pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa terjadi heterokedastisitas. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil garfik scatterplot ini akan ditunjang dengan uji glejser. Uji ini dengan melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansinya (0,05), maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Setelah data diuji dengan uji asumsi klasik, dan jika tidak terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis.



### 3.5.3 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien korelasi (R) merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan-hubungan yang terdapat pada dua atau lebih variabel independen dalam penelitian terhadap variabel dependennya secara serentak atau bersama-sama. Sedangkan koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1, apabila  $R^2=0$  berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan jika  $R^2=1$  berarti suatu hubungan yang sempurna. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka digunakan *adjusted  $R^2$*  sebagai koefisien determinasi.

### 3.5.4 Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel independennya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.5.5 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara *partial* variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara *partial* variabel independennya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.





## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu karakteristik komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan pada tahun 2009 dan 2010. Sesuai aturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan, maka Bursa mensyaratkan batas waktu penyampaian laporan tahunan pada 30 April pada tahun 2009 dan 2010 berturut-turut, sementara pada tahun sebelumnya yakni 2008 mensyaratkan batas waktu penyampaian 31 Maret sehingga peneliti memilih periode waktu penelitian selama tahun 2009 dan 2010.

Setelah melewati proses pemilihan sampel dengan teknik *judgement sampling*, dari 44 perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan secara berturut-turut tahun 2009 dan 2010, terdapat 15 emiten atau perusahaan yang layak dan *representatif* serta memiliki data yang lengkap tentang komite audit untuk dijadikan sampel penelitian ( $2 \times 15$ ) atau 30 observasi selama periode penelitian yaitu tahun 2009 dan 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan dan 3 variabel independen yang meliputi independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit dan *financial expertise* komite audit. Data dari ketiga variabel independen tersebut adalah data sekunder yang diperoleh dari *annual report* atau laporan tahunan yang di *release* oleh perusahaan.

Secara keseluruhan, data mengenai ketiga variabel independen dari 15 perusahaan sampel tersebut dapat dilihat di lampiran 1. Sementara jumlah hari lamanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian disajikan pada tabel 4.1. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan melihat asumsi klasik dan persyaratan yang dipenuhi dalam penelitian ini. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan komputer melalui program *SPSS for Windows*.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Jumlah Hari Keterlambatan Penyampaian**  
**Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan**

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE	KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (JUMLAH HARI)	
			2009	2010
1	PT ATPK Resources Tbk	ATPK	132	55
2	PT Bank Mutiara Tbk	BCIC	41	31
3	PT Sentul City Tbk	BKSL	3	2
4	PT Citra Kebun Raya Agri Tbk	CKRA	26	61
5	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	IMAS	45	16
6	PT Indosat Tbk	ISAT	34	19
7	PT Jakarta International Hotels & Development Tbk	JIHD	17	31
8	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	KIJA	12	31
9	PT Modernland Internasional Tbk	MDRN	11	13
10	PT Medco Energy Internasional Tbk	MEDC	14	11
11	PT Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	41	73
12	PT Royal Oak Development Asia Tbk	RODA	27	31
13	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	SSTM	60	51
14	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	TKIM	39	20
15	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	TRUB	46	79

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011



## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk melihat bagaimana karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian. Hasil statistik deksriptif dalam penelitian ini terbagi atas tiga bagian. Pertama hasil statistik deskriptif untuk variabel dependen yang keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang disajikan dalam tabel 4.2. Sementara hasil statistik deskriptif yang kedua adalah untuk semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang disajikan dalam tabel 4.4.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif**

Tahun	Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
2009 - 2010	Keterlambatan	2.00	132.00	35.7333	31,0000	26.99544

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bahwa sepanjang periode penelitian yakni pada tahun 2009 hingga tahun 2010, dari 30 observasi sampel didapat bahwa *mean* atau rata-rata keterlambatan perusahaan menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaannya adalah 35,7333 atau dibulatkan menjadi 36 hari. Nilai minimum variabel *dependen* atau terikat ini yaitu 2 dan nilai maksimumnya adalah 132. Maka selama kurun waktu 2009 dan 2010 perusahaan menyampaikan laporan keuangan tahunannya mengalami keterlambatan selama 2 hari hingga 132 hari. Median dari hasil uji statistik deskriptif adalah 31,000 dimana dapat dinyatakan bahwa 50% dari data observasi mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunannya antara 2 – 30 hari, sementara 50% dari data observasi terlambat selama 32 – 132 hari dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya.

Dari nilai rata-rata atau *mean* dari masing-masing jumlah hari keterlambatan perusahaan maka dapat dikelompokkan ke dalam kelas interval. Interval merupakan kisaran data penelitian yang diperoleh melalui selisih nilai maksimum dengan minimum dibandingkan jumlah kelas (Dajan, 1992) yaitu :

Interval :  $\frac{\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum}}{\text{Jumlah kelas}}$

$$\text{Interval} : \frac{132 - 2}{3} = 43 \text{ hari}$$

Dengan demikian diperoleh kategori tingkat variabel *dependen* sebagai berikut :

2 - 44 = Low

45 - 87 = Medium

88 - 130 = High

**Tabel 4.3**

**Kategori Tingkatan Keterlambatan Berdasarkan Kelas Interval**

Kategori Tingkat Keterlambatan	Tahun 2009		Tahun 2010	
	Jumlah Perusahaan	Persentase	Jumlah Perusahaan	Persentase
Low	11	73,33	10	66,67
Medium	3	20,00	5	33,33
High	1	6,67	0	0,00

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.3 tentang kategori tingkatan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan sampel berdasarkan kelas interval, maka yang termasuk ke dalam kategori low yakni antara 2 – 43 hari keterlambatannya pada tahun 2009 adalah sebanyak



11 perusahaan dari 15 perusahaan atau sebesar 73,33 % dari keseluruhan sampel, sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 yang termasuk ke dalam kategori low ini adalah sebanyak 10 perusahaan. Pada tahun 2009 yang termasuk ke dalam kategori tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangannya medium adalah sebanyak 3 perusahaan dimana merupakan 20% dari keseluruhan perusahaan yang mengalami keterlambatan, sedangkan pada tahun 2010 terjadi kenaikan pada kategori rendah ini yaitu sebanyak 5 perusahaan atau sebesar 33,33%. Yang termasuk ke dalam kategori tingkatan high dengan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunannya selama 88 – 130 hari pada tahun 2009 adalah berjumlah 1 perusahaan, namun pada tahun 2010 tidak ada perusahaan yang mengalami keterlambatan.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif**

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Independensi	.67	1.00	.9317	.11973
Pertemuan	1.00	12.00	5.8667	3.15937
<i>Financial Expertise</i>	.33	1.00	.5375	.19327

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Dari jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunannya, diperoleh rata-rata atau *mean* variabel independensi komite audit sebesar 0.9317, nilai minimum 0.67, nilai maksimum 1.00 dan standar deviasi 0.11973. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat independensi perusahaan-perusahaan sampel sudah terbilang tinggi dengan didapatkannya rata-rata sebesar

0.9317 artinya rata-rata 93,17% dari perusahaan sampel sudah memiliki komite audit yang bebas dari kepentingan pihak manapun atau berasal dari eksternal perusahaan.

*Meet* atau jumlah pertemuan komite audit memiliki nilai *mean* 5.8667 dengan nilai minimum 1.00 dan nilai maksimum 12.00 serta standar deviasi sebesar 3.15937. Dari nilai rata-rata jumlah pertemuan komite audit yang didapat yakni sebesar 5.8667 maka dapat dikatakan bahwa secara umum dari 15 perusahaan sampel ini sudah memenuhi pedoman pembentukan komite audit yang efektif oleh KNGCG yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan komite audit paling kurang 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun.

Besarnya *financial expertise* dari 30 observasi selama tahun 2009 dan 2010, didapat data bahwa nilai *mean* sebesar 0.5375, nilai minimum 0.33, nilai maksimum 1.00, dan standar deviasi 0.19327. Dimana perhitungan *financial expertise* ini dengan proporsi jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta pengalaman kerja di bidang auditing, dibagi terhadap seluruh jumlah anggota komite audit, maka dari nilai *mean* sebesar 0.5375 artinya rata-rata selama tahun 2009 dan 2010 perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki lebih dari setengah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi atau keuangan tersebut.

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik uji normalitas maupun uji asumsi klasik terhadap model regresi, yang meliputi uji autokorelasi, uji multikolenieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik model regresi tersebut. Pelanggaran terhadap asumsi klasik akan menyebabkan koefisien-koefisien regresi memiliki



*standard error* atau *variance* yang besar sehingga dapat mengurangi keandalan penaksiran parameter. Pelanggaran terhadap asumsi klasik juga dapat menyebabkan statistik yang dihasilkan dari analisis *variance* tidak menjadi tidak akurat. Dengan demikian variabel independen independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit dan *financial expertise* komite audit sebagai estimasi atas variabel dependen yaitu keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan menjadi tidak bias.

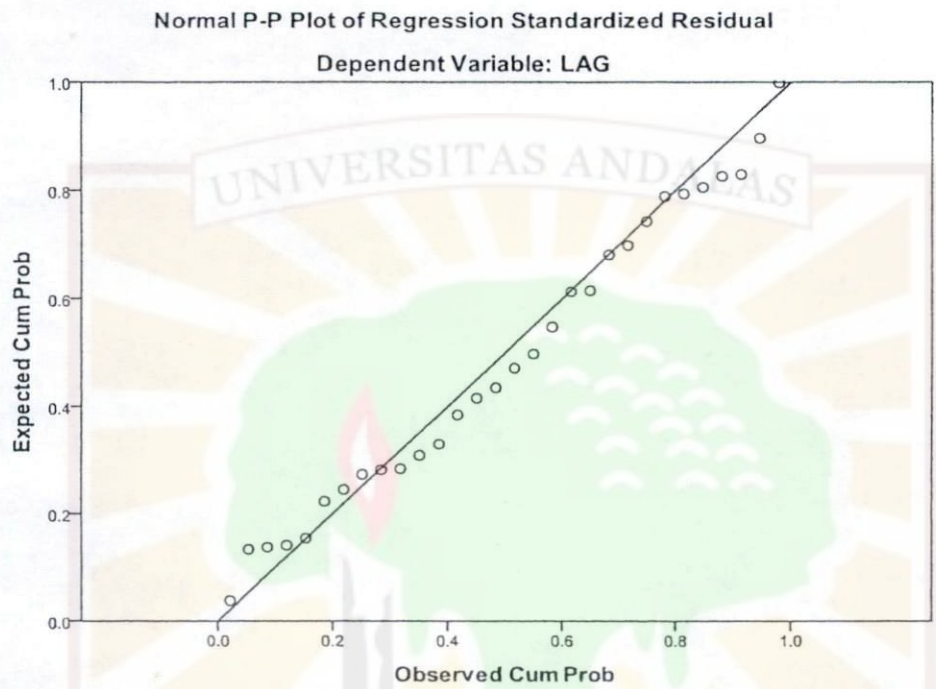
#### 4.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dari variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Dengan melakukan uji normalitas maka kita dapat melihat apakah data sudah berdistribusi normal atau belum dan untuk menentukan apakah data layak atau tidak untuk dianalisa. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data (Wijaya, 2011).

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan tabel normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperkuat pengujian maka dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dimana uji *Kolmogorov-Smirnov* ini dilakukan untuk menguji independensi dari 1 sampel atau 2 sampel pada skala ordinal dan uji ini lebih *powerful* dibanding uji Chi-Square atau Mann Whitney U. Hasil dari

pengujian normalitas yang dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut seperti yang tampak pada gambar 4.1

Gambar 4.1



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Tabel 4.5

Hasil Perhitungan Uji Kolmogorov-Smirnov

Keterangan	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	.499
Asymp. Sig. (2-tailed)	.965

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011



Berdasarkan tabel 4.5 di atas, menunjukkan nilai pengujian Kolmogorof-Smirnov adalah 0,965 yang ditunjukkan dari nilai Sig. (2-tailed). Dengan tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat  $\alpha$  sebesar 0,05 maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal. Sementara berdasarkan gambar 4.1 hasil grafil normal p-plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Gambar ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Maka dari hasil kedua uji normalitas ini penelitian dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi aumsi normalitas dan berdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan yang mengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan periode  $t-1$  (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya *problem* atau autokorelasi. Autokorelasi diujii dengan menggunakan metode Durbin Watson (DW).

**Tabel 4.6**

#### **Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi**

dL	dU	Durbin-Watson
1,2138	1,6498	1,402

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dikatakan bahwa nilai Durbin Watson (DW) adalah 1,402 dengan derajat kepercayaan (*significance level*) sebesar 5%, jumlah sampel 30 dan jumlah

variabel independen 3. Dari tabel Durbin Watson (DW) didapatkan  $dl < DW < dU$  dimana nilainya adalah  $1,2138 < DW < 1,6498$  serta  $dL < DW < (4-dL)$  dimana  $1,2138 < DW < 2,7862$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

### 4.3.3 Uji Multikolenieritas

Pengujian multikolenieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam suatu model. Kemiripan antar variabel dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel-variabel independen yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF besar dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka variabel independen tersebut memiliki persoalan multikolinieritas dengan variabel independen lainnya. Sebaliknya, jika nilai VIF kecil dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka variabel independen tersebut tidak memiliki persoalan multikolinieritas dengan variabel independen lainnya.

Tabel 4.7

Hasil Perhitungan Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Colinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Independensi	.962	1.039	Bebas Multikolinearitas
Pertemuan	.921	1.086	Bebas Multikolinearitas
<i>Financial Expertise</i>	.899	1.113	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011



Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen yakni independensi, pertemuan dan *financial expertise* tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat persoalan multikolinieritas antara variabel independen tersebut dengan variabel-variabel independen lainnya sehingga model regresi dalam penelitian ini terbebas dari persoalan multikolinieritas.

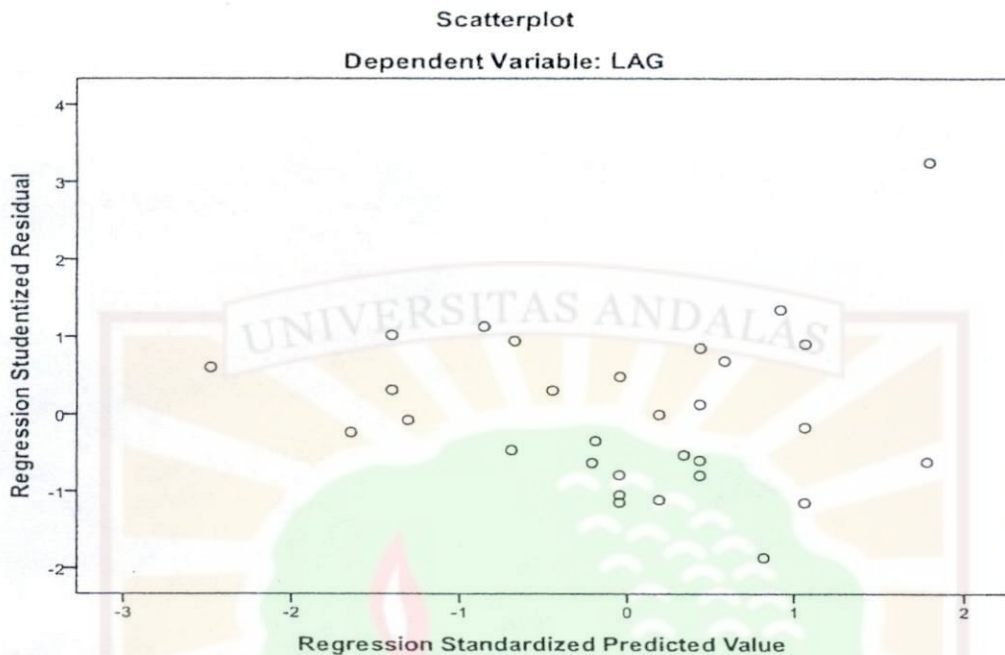
#### 4.3.4 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentize delete residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada atau tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot*. Suatu model regresi dikatakan terbebas dari heterokedastitas jika :

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

Hasil dari pengujian heterokedastisitas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka nol dan tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat persoalan heterokedastisitas dalam model regresi dan model regresi layak digunakan dalam penelitian.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesisi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menentukan apakah hipotesis yang diusulkan diterima atau ditolak. Pengujian ini terdiri dari Uji Koefisien Korelasi ( $R$ ) dan Determinasi ( $R^2$ ), Uji F dan Uji t.



#### 4.4.1 Uji Koefisien Korelasi ( R ) dan Determinasi ( R<sup>2</sup> )

Uji koefisien korelasi ( R ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua atau lebih variabel independen ( independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit dan *financial expertise* komite audit) terhadap variabel dependen (keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan) secara serentak. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Jika koefisien korelasi positif, maka variabel memiliki hubungan yang searah dan sebaliknya. Sarwono (2006) menjelaskan beberapa kriteria mengenai kekuatan hubungan antara variabel dalam penelitian yaitu :

1.  $R = 0$  maka tidak ada korelasi.
2.  $0 < R < 0,25$  maka korelasi dikatakan lemah.
3.  $0,25 < R < 0,75$  maka korelasi kuat.
4.  $0,75 < R < 0,99$  maka korelasi sangat kuat
5.  $R = 1$  maka terjadi korelasi sempurna.

Uji koefisien determinasi R<sup>2</sup> bertujuan untuk mengetahui besarnya proporsi variabel-variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Dalam regresi R<sup>2</sup> ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Koefisien determinasi adalah  $0 < R^2 < 1$ , dimana jika nilai R<sup>2</sup> semakin mendekati 1 maka variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.8

Hasil Perhitungan Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi ( $R^2$ )

R	R Square	Adjusted R Square
.656	.431	.365

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Dari tabel 4.8 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,656. Ini berarti bahwa hubungan antara independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit dan *financial expertise* komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan adalah bisa dikatakan cukup kuat karena nilai R berada di antara 0,25 dan 0,75. Untuk koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel 4.8, yang digunakan adalah *Adjusted R Square* karena variabel independen dalam model regresi ini adalah 3 variabel atau lebih dari satu variabel. Pada tabel ditunjukkan bahwa *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,365. Nilai ini mengindikasikan bahwa 36,5 % dari total variasi dependen dapat dijelaskan oleh model yang disajikan dalam penelitian. Variabel independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit dan *financial expertise* komite audit mampu menjelaskan variabel keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan sebesar 36,5%.

#### 4.4.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan *level of significant* 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Hasil dari uji F adalah sebagai berikut :



Tabel 4.9

Hasil Perhitungan Uji F

F Hitung	Sig.
6.554	.002

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 6,554 dengan tingkat signifikan didapat sebesar 0,002, jumlah sampel 30 dan jumlah variabel independen 3, dimana angka ini lebih kecil dari *level of significant* sebesar 0,05. Oleh karena itu  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat satu atau lebih variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian tersebut. Variabel-variabel independen yakni variabel independensi Komite Audit, jumlah pertemuan Komite Audit dan *financial expertise* Komite Audit secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian yaitu keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

#### 4.4.3 Uji t

Uji t atau uji parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial atau secara individu terhadap variabel dependen pada penelitian, dengan *level of significant* 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Jika nilai probabilitas ( $p$ ) kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima, artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Hasil pengujian hipotesis ini disajikan pada tabel 4.10 seperti berikut :

Tabel 4.10

## Hasil Perhitungan Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Signifikansi	Keterangan
(Constant)	23.683			
Independensi	58.948	1.733	.095	Tidak Signifikan
Pertemuan	-4.258	-3.231	.003	Signifikan
<i>Financial Expertise</i>	-33.277	-1.526	.139	Tidak Signifikan

Maka berdasarkan tabel 4.10 yang tertera di atas, dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\text{LAG} = 23,683 + 58,948 \text{ INDEPENDENCE} - 4,258 \text{ MEETING} - 33,277 \text{ FINANCIAL}$$

Besar koefisien dari masing-masing variabel menggambarkan berapa besar perubahan keterlambatan yang terjadi apabila variabel-variabel independen tersebut mengalami kenaikan atau penurunan satu satuan. Nilai konstanta yang diperoleh adalah 23,683 yang berarti jika independensi, jumlah pertemuan dan *financial expertise* komite audit bernilai nol, maka perusahaan akan mengalami keterlambatan sebesar 24 hari dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya.

Nilai koefisien regresi variabel independensi komite audit adalah 58,948. Hal ini berarti setiap peningkatan independensi komite audit satu satuan dengan asumsi semua variabel independen selain independensi konstan akan menyebabkan peningkatan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan sebesar 59 hari. Variabel independensi



komite audit memiliki nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,95. Nilai probabilitas t-hitung ini ternyata lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  sehingga penelitian ini menerima  $H_{01}$  dan menolak  $H_{a1}$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel independensi komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

Variabel jumlah pertemuan komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar -4,258 dimana jika terjadi peningkatan satu satuan, akan menurunkan 4 hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan jika diasumsikan semua variabel independen selain jumlah pertemuan komite audit. Sementara untuk nilai probabilitas t-hitung jumlah pertemuan komite audit ini adalah sebesar 0,03. Nilai probabilitas t-hitung ini ternyata lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga penelitian ini menolak  $H_{02}$  dan menerima  $H_{a2}$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pertemuan atau rapat komite audit ini berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan (LAG).

Nilai koefisien regresi variabel *financial expertise* komite audit adalah -33,277. Hal ini berarti setiap peningkatan *financial expertise* komite audit sebanyak satu satuan dengan asumsi semua variabel independen selain *financial expertise* ini konstan, akan menyebabkan penurunan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan sebanyak 33 hari. Variabel *financial expertise* komite audit memiliki nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,139. Nilai probabilitas t-hitung ini ternyata lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  sehingga penelitian ini menerima  $H_{03}$  dan menolak  $H_{a3}$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel *financial expertise* komite audit ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.



#### 4.5 Pembahasan

Dalam tabel 4.11 akan terlihat rangkuman hasil penelitian secara keseluruhan yang berupa hasil pengujian hipotesis.

**Tabel 4.11**  
**Rangkuman Hasil Penelitian**

Hipotesis Penelitian	Hipotesis	Keterangan Hasil Penelitian
H <sub>1</sub> : Independensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.	Ditolak	Independensi komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.
H <sub>2</sub> : Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.	Diterima	Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.
H <sub>2</sub> : <i>Financial expertise</i> komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan	Ditolak	<i>Financial expertise</i> komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan



#### 4.5.1 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan

Independensi komite audit mencerminkan sikap objektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta tidak memihak kepada siapapun. Dalam penelitian ini, independensi komite audit diproksikan dengan menggunakan persentase dari anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah seluruh anggota komite audit. Hasil pengujian  $t$  menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit memiliki nilai probabilitas  $t$ -hitung 0,095 dimana lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 yang berarti bahwa variabel independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Sementara hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit memiliki koefisien regresi sebesar 58,94. Koefisien regresi tersebut berarti bahwa jika independensi komite audit meningkat, menyebabkan jumlah hari keterlambatan juga meningkat atau dengan kata lain independensi komite audit berpengaruh positif terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Hal ini disebabkan karena anggota komite audit yang independen berasal dari kaum akademisi dan profesional sehingga menyebabkan semakin independen komite audit akan lebih lama dan mendalam dalam mereview dan memonitor pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini menolak  $H_1$  yang menyebutkan bahwa independensi komite audit ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiek (2006) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara independensi komite audit dengan ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan tersebut. Maka tingkat independensi suatu komite audit yang tinggi belum menjamin akan perusahaan untuk tidak mengalami

keterlambatan dalam penyampaian laporan tahunannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disebabkan karena tingkat independensi komite audit masih diragukan. Dimana hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widagdo et al. (2002) yang melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan klien. Dari 12 atribut yang diteliti, ternyata independensi termasuk ke dalam kategori atribut yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan klien, hal ini menandakan bahwa tingkat independensi komite audit masih diragukan dan dipertanyakan di Indonesia.

Faktor posisi dari komite audit yang masih bisa ditekan oleh manajemen menjadi salah satu keadaan yang membuat independensi anggota komite audit masih belum mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, dimana hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Deis dan Giroux (1992) yang mengatakan bahwa pada konflik kekuatan, klien akan menekan auditor untuk melawan standar profesional kerja. Selanjutnya ketika manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk memaksa auditor melakukan tindakan yang melawan standar (Nichols dan Price, 1976).

Hasil penelitian ini dapat diterima mengingat masih lemahnya praktik *Corporate Governance* di Indonesia. Di Indonesia penentuan tingkat independensi komite audit berdasar pada Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang menyebutkan bahwa minimal tiga orang yang seluruhnya komite audit adalah anggota independen yang terdiri atas satu orang komisaris independen dan dua orang anggota yang berasal dari luar emiten. Namun proses penunjukkan anggota komite audit masih belum jelas dan terbuka sehingga tingkat independensinya masih patut diragukan (Anggarini, 2010). Adanya ketentuan anggota komite audit pada perusahaan di Indonesia hanya



dijadikan sekedar memenuhi ketentuan regulasi dan menghindari sanksi yang ada sehingga belum efektif dalam menjalankan fungsinya.

#### **4.5.1 Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan**

Pertemuan komite audit mencerminkan peran komite audit dalam pengawasan proses pelaporan keuangan dan pemantauan atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *corporate governance* sesuai dengan pedoman pembentukan komite audit yang efektif (2002). Dalam penelitian ini, jumlah pertemuan komite audit dihitung secara numerik dari jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam satu tahun. Hasil pengujian *t* menunjukkan bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit memiliki nilai probabilitas *t* hitung 0,003 dimana lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 yang berarti bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit memiliki koefisien regresi sebesar -4,258. Koefisien regresi tersebut berarti bahwa jika variabel jumlah pertemuan komite audit meningkat maka akan menyebabkan penurunan jumlah hari keterlambatan atau variabel jumlah pertemuan komite audit ini berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini menerima H2 yang menyebutkan bahwa komite audit ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Putri (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi frekuensi pertemuan yang dilakukan komite audit maka akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen. Razman and Iskandar (2004) dalam

penelitiannya yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di Malaysia menemukan bahwa perusahaan yang melakukan pelaporan yang baik, melakukan pertemuan dengan frekuensi yang lebih banyak sehingga dapat melakukan *monitoring* terhadap aktivitas manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit, baik dengan sesama anggota komite audit maupun dengan manajemen, auditor internal, eksternal auditor serta pihak-pihak yang dirasa perlu, hal ini akan dapat membuat perusahaan menghindari keterlambatan dalam penyampaian laporan tahunannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dave Tate (2007) tentang 30 atribut dari efektifnya suatu komite audit perusahaan, komunikasi menjadi salah satu hal yang penting. Dijelaskan selanjutnya bahwa komunikasi oleh komite audit ini dapat dilakukan antara sesama anggota komite audit maupun dengan pihak-pihak di luar komite. Pihak-pihak di luar komite yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang berkepentingan bagi komite audit dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, termasuk Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Auditor eksternal, Auditor internal, Manajemen perusahaan dan pihak-pihak lainnya yang dirasa perlu.

Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Rashidah (2010) yang tidak menemukan pengaruh antara jumlah pertemuan komite audit dengan keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan karena semakin banyak frekuensi pertemuan komite audit tidak memberikan pencapaian sesuatu bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya memastikan bahwa komite audit dapat menyelesaikan masalah dengan manajemen selama dilakukannya pertemuan dan sebagai hasilnya dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan perusahaan. Ketidak konsisten ini disebabkan karena penelitian yang telah dilakukan hanya menghitung jumlah frekuensi pertemuan komite audit secara numeral dan



belum meneliti tentang bagaimana kualitas pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tersebut.

#### 4.5.1 Pengaruh *Financial Expertise* Komite Audit terhadap Penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan

*Financial expertise* komite audit mencerminkan kompetensi atau pemahaman anggota komite audit terhadap laporan keuangan, audit dan sistem dalam perusahaan. *Financial expertise* ini diukur dari jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan, serta adanya pengalaman sebagai akuntan publik atau auditor, sesuai dengan aturan Bapepam (2004). Hasil pengujian *t* menunjukkan bahwa variabel *financial expertise* komite audit memiliki nilai probabilitas *t*-hitung 0,139 dimana lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 yang berarti bahwa variabel *financial expertise* ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel besarnya *financial expertise* komite audit memiliki koefisien regresi sebesar -33,277 dimana koefisien regresi tersebut menunjukkan jika terjadi peningkatan terhadap nilai *financial expertise* komite audit, menyebabkan penurunan dari jumlah hari keterlambatan atau dengan kata lain variabel *financial expertise* berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Hal ini disebabkan semakin banyak anggota komite audit yang memiliki *financial expertise* maka akan lebih efektif dalam melakukan mitigasi terhadap kesalahan maupun masalah dalam pelaporan keuangan dan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaannya. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini menolak H1 yang menyebutkan bahwa besarnya *financial*

*expertise* komite audit ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2005) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi terhadap efektivitas peranan komite audit. Maka tinggi atau rendahnya *financial expertise* komite audit dalam perusahaan tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan tahunannya kepada Bursa. Penelitian ini berkesimpulan bahwa tidak berpengaruhnya *financial expertise* terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan karena persyaratan Bapepam yang dimana diharuskan minimal 1 orang dengan latar belakang dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan tersebut hanya dipraktikkan sebagai formalitas oleh perusahaan seperti penelitian Khomsiyah (2005) yang menyatakan pembentukan komite audit yang mempunyai keahlian hanya didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Beberapa penelitian yang juga mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa *financial expertise* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, menjelaskan bahwa penyebab lainnya adalah belum adanya aturan yang jelas dan terinci dalam *financial expertise* yang harus dimiliki oleh komite audit yang berpengaruh terhadap penunjukkan anggota komite audit perusahaan (Fitriasari, 2007). Akibatnya setiap perusahaan sampel kemungkinan memiliki definisi yang berbeda-beda.

Beberapa penelitian yang tidak mendukung hasil penelitian ini menyatakan bahwa besarnya *financial expertise* berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan. Atiek (2006) menemukan pengaruh yang signifikan antara besarnya *financial expertise* dengan keterlambatan penyampaian laporan tahunan, dimana



berkesimpulan bahwa hal ini didukung dengan teori berupa rekomendasi BRC yang pernah menyatakan bahwa sebuah komite audit yang memiliki Certified Public Accountant (CPA), pernah menjadi anggota komite audit, atau memiliki pengetahuan yang bagus tentang auditing, berpengaruh secara positif terhadap lingkungan yang akan dihadapi. Kemudian Zhang & Zhou (2007) juga sependapat dengan pernyataan tersebut, dimana menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki *internal control* yang rendah, diindikasikan dengan kurang atau tidak adanya komite audit yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan sehingga dapat mengurangi *monitoring* oleh komite audit terhadap kegiatan manajemen yang salah satunya terhadap kepatuhan aturan bursa.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel independensi komite audit yang diproksikan oleh persentase dari jumlah anggota komite audit yang independen dengan total anggota komite audit perusahaan, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit yang diproksikan oleh jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam setahun, berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel *financial expertise* yang diproksikan oleh proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan terhadap keseluruhan jumlah anggota komite audit, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.



## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Meskipun demikian, penelitian ini masih mengandung beberapa keterbatasan antara lain :

1. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini masih sedikit serta periode observasi hanya menggunakan tahun 2009-2010.
2. Adanya kriteria dalam teknik *judgement sampling* tentang data atau informasi mengenai komite audit pada *annual report* atau laporan tahunan perusahaan, menyebabkan sampel menjadi semakin sedikit.
3. Adanya aturan tentang jangka waktu keterlambatan oleh Bursa Efek Indonesia yang beberapa kali mengalami perubahan, menjadikan periode penelitian menjadi lebih pendek.
4. Data tentang karakteristik komite audit hanya berupa data kuantitas, sehingga belum menjelaskan tentang kualitas yakni proses kerja dari komite audit secara lebih rinci.
5. Dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan proses kerja yang dilakukan komite audit namun hanya karakteristik dari komite audit.

### 5.3 Implikasi Penelitian di Masa yang Akan Datang

Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan di atas, maka riset lebih lanjut perlu dilakukan guna menguji konsistensi hasil. Maka penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Antara lain :

1. Untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan mencari pengaruh keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dimana karakteristik komite audit bisa menjadi moderating dalam penelitian tersebut.
2. Perlunya diadakan penelitian selanjutnya tentang komite audit secara kualitas, bukan hanya secara kuantitas sehingga dapat diketahui kinerja komite audit dan bagaimana komite audit dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu mekanisme *Corporate Governance*.
3. Periode penelitian perlu diperpanjang, agar dapat variabel dependen keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan bisa lebih signifikan.
4. Sumber data penelitian berupa karakteristik komite audit selanjutnya diharapkan bukan hanya bersumber dari *annual report* semata sehingga banyak perusahaan yang bisa dijadikan sampel penelitian.
5. Selain menggunakan informasi *annual report* atau laporan tahunan perusahaan maka diharapkan nantinya dapat juga menggunakan informasi karakteristik komite audit dari data lain sebagai pelengkap data penelitian. Penggunaan data lain tersebut dapat diperoleh misalnya dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun data langsung dari perusahaan berupa data kegiatan rapat komite audit dan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonious. 2003. "Keberadaan & Peran Komite Audit Dalam Rangka Impelementasi GCG". *Seminar Nasional FKSPIBUMN/BUMD*. FCGI
- Alijoyo, Antonious dan Ali Darwin. 2006. **Komite Audit Yang Efektif: Panduan Untuk Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan Publik**. Ray Indonesia. Jakarta.
- Anggarini, Tifani Vota. 2010. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Financial Distress*". FEUNDIP
- Atiek, Sri Purwati. 2006. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat di BEJ". FEUNDIP
- Bapepam, 2004. *Pembentukan Komite Audit*. Surat Edaran Bapepam No. Kep-29/PM/ 2004.
- Bapepam, 2006. *Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan*. Surat Edaran Bapepam No. Kep-134/BL/2006
- Baridwan, Anis. 2007. "Enforcing GCG Practices at Listed Companies. *Sustaining Company value Through GCG-Based Business Practices*. Nusa Dua, Bali, Agustus 31.
- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. *Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit committee*. New York, N.Y: New York stock Exchange and National Association of Securities Dealers.
- Clatworthy, Mark A. 2010. "Does Corporate Governance Influence the Timeliness of Financial Reporting?". *Accounting and Management Control Department Research Seminar*, December 10.
- Deis, D.R. dan G.A. Groux. 1992. Determinants of Audit Quality in The Public Sector. *The Accounting Review*. Juli. p. 462-479.
- Dwiyanti, Rini. 2010. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". FEUNDIP
- FCGI, 2000. Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan). *Booklet* Jilid I Edisi ke-1.
- Firmansyah, Arif. 2010. "Peranan Komite Audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal Dalam Penerapan GCG di PT BNP". *Jurnal Hukum Vol XII No. 1*, Maret. 2010.
- Fitriasari, Debby. 2007. Pengaruh Aktivitas dan Financial Literacy Komite Audit terhadap Jenis Manajemen Laba. *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi*, Makasar, 26-28 Juli 2007.

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbit Univ Diponegoro. Semarang.
- Tugiman, Hiro. 1995. Komite audit PT. Eresco. Bandung
- Umni dan Rashidah. 2010. "Audit Report Lag and The Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian Listed Companies". *International Bulletin of Business Administration*. EuroJournals. Inc.
- Kemenkeu. 1995. *UU Tentang Sanksi Bursa*. UU RI No. 8/1995.
- Khomsiyah, Azzam Jasin dan Muammar Aditya. 2005. Karakteristik Komite Audit dan Pengungkapan Info. *Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance*. h. 1-18.
- Nichols, D., and K. Price. 1976. "The auditor-firm conflict: An analysis using concepts of exchange theory", *The Accounting Review* (April): 335-346.
- Prasad, Kesho. 2006. *Corporate Governance*. Prentice-Hall of India Private Limited. New Delhi
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Mediakom. Yogyakarta.
- Putra, Akbar Rahman Bagyo. 2010. "Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penyajian Laba Kembali.
- Putri, Destika Maharani. 2011. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba". FE UNDIP. Rachmawati, Sistya. 2006. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap *Audit Delay* dan *Timeliness*". FEUI.
- Razman, S.R., and Iskandar M.T., 2004. "The Effectiveness of Audit Committee in Monitoring the Quality of Corporate Reporting", A Chapter in *Corporate Governance: An International Perspective*. MICG Publication: 154-175.
- Rizqiasih, Putri Dyah. 2010. "Pengaruh Struktur *Governance* Terhadap *Fee Audit* Eksternal. FE UNDIP.
- Suaryana, Agung. 2003. "Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba". FE UNIV UDAYANA.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance*. Kena Prenada media Grup. Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta



- Tate, David. 2007. 30 Atributes of Effective Audit Committees. *http://davidtate.us/* , diakses 13 Desember 2011.
- Toha, Akhmad. 2004. “Efektifitas Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol 8, h. 17-41.
- Tricker, Bob. 2009. *Corporate Governance : Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press. New York
- Trihapsari, Elisa. 2006. “Analisis Korelasi Antara Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dengan Manajemen Laba Pada Emiten Di Bursa Efek Jakarta”. PASCASARJANAUNDIP.
- Wenny, Carmel Meiden. 2007. “Variabel Total Lag Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di BEJ”. *Akuntabilitas*, September, Hal 180-22.
- Widagdo, R, S. Lesmana, dan S.A. Irwandi. 2002. Analisis Pengaruh Atribut-atribut Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *SNA 5 Semarang*. p. 560-574.
- Wijaya, Toni. 2011. *Cepat Menguasai SPSS 19*. Cahay Atma. Yogyakarta.



## Lampiran 1

### Data mengenai variabel independen dari 30 observasi

#### 1. Variabel Independensi Komite Audit

NO	KODE EMITEN	NAMA EMITEN	INDEPENDENSI KOMITE AUDIT	
			TAHUN 2009	TAHUN 2010
1.	ATPK	PT.ATPK RESOURCES Tbk	100%	100%
2.	BCIC	PT.BANK MUTIARA Tbk	100%	100%
3.	BKSL	PT.SENTUL CITY Tbk	75%	100%
4.	CKRA	PT.CITRA KEBUN RAYA AGRI Tbk	100%	100%
5.	IMAS	PT.INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk	100%	100%
6.	ISAT	PT.INDOSAT Tbk	80%	80%
7.	JIHD	PT.JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk	100%	100%
8.	KIJA	PT.KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk	100%	100%
9.	MDRN	PT.MODERNLAND INTERNASIONAL Tbk	100%	100%
10.	MEDC	PT.MEDCO ENERGY INTERNASIONAL Tbk	80%	80%
11.	PKPK	PT.PERDANA KARYA PERKASA Tbk	66,67%	100%
12.	RODA	PT.ROYAL OAK DEVELOPMENT ASIA Tbk	100%	100%
13.	SSTM	PT.SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk	100%	100%
14.	TKIM	PT.PABRIK KERTAS TWIJI KIMIA Tbk	66,67%	66,67%
15.	TRUB	PT.TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING Tbk	100%	100%



## Lampiran 2

### 2. Variabel Jumlah Pertemuan Komite Audit

NO	KODE EMITEN	NAMA EMITEN	JML PERTEMUAN KOMITE AUDIT	
			TAHUN 2009	TAHUN 2010
1.	ATPK	PT.ATPK RESOURCES Tbk	1	1
2.	BCIC	PT.BANK MUTIARA Tbk	12	4
3.	BKSL	PT.SENTUL CITY Tbk	12	12
4.	CKRA	PT.CITRA KEBUN RAYA AGRI Tbk	4	4
5.	IMAS	PT.INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk	6	5
6.	ISAT	PT.INDOSAT Tbk	7	6
7.	JIHD	PT.JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk	11	11
8.	KIJA	PT.KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk	5	7
9.	MDRN	PT.MODERNLAND INTERNASIONAL Tbk	6	6
10.	MEDC	PT.MEDCO ENERGY INTERNASIONAL Tbk	8	9
11.	PKPK	PT.PERDANA KARYA PERKASA Tbk	4	4
12.	RODA	PT.ROYAL OAK DEVELOPMENT ASIA Tbk	4	4
13.	SSTM	PT.SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk	6	4
14.	TKIM	PT.PABRIK KERTAS TWIJI KIMIA Tbk	3	4
15.	TRUB	PT.TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING Tbk	4	2

### Lampiran 3

#### 3. Variabel *Financial Expertise* Komite Audit

NO	KODE EMITEN	NAMA EMITEN	FINANCIAL EXPERTISE KOMITE AUDIT	
			TAHUN 2009	TAHUN 2010
1.	ATPK	PT.ATPK RESOURCES Tbk	1/3	1/3
2.	BCIC	PT.BANK MUTIARA Tbk	1/3	1/3
3.	BKSL	PT.SENTUL CITY Tbk	3/4	3/4
4.	CKRA	PT.CITRA KEBUN RAYA AGRI Tbk	3/3	2/3
5.	IMAS	PT.INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk	2/3	2/3
6.	ISAT	PT.INDOSAT Tbk	2/5	2/5
7.	JIHD	PT.JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk	3/4	3/4
8.	KIJA	PT.KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk	1/3	1/3
9.	MDRN	PT.MODERNLAND INTERNASIONAL Tbk	2/3	2/3
10.	MEDC	PT.MEDCO ENERGY INTERNASIONAL Tbk	2/5	3/5
11.	PKPK	PT.PERDANA KARYA PERKASA Tbk	2/3	1/3
12.	RODA	PT.ROYAL OAK DEVELOPMENT ASIA Tbk	2/3	2/3
13.	SSTM	PT.SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk	1/3	1/3
14.	TKIM	PT.PABRIK KERTAS TWIJI KIMIA Tbk	1/3	1/3
15.	TRUB	PT.TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING Tbk	2/3	2/3



Lampiran 4

Hasil Pengujian Dengan SPSS

REGRESSION

Tahun 2009

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
LAG	15	3.00	132.00	36.5333	30.87733	953.410
Valid N (listwise)	15					

Tahun 2010

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
LAG	15	2.00	79.00	34.9333	23.55379	554.781
Valid N (listwise)	15					

Tahun 2009-2010

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
LAG	30	2.00	132.00	35.7333	26.99544	728.754
Valid N (listwise)	30					

Statistics

LAG		
N	Valid	30
	Missing	0
Median		31.0000
Std. Deviation		26.99544

Lampiran 5

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INDEP	30	.67	1.00	.9317	.11973
MEET	30	1.00	12.00	5.8667	3.15937
FINANC	30	.33	1.00	.5375	.19327
Valid N (listwise)	30				





Lampiran 6

Dengan Uji Kosmogrof-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		LAG	INDEP	MEET	FINANC
N		30	30	30	30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	35.7333	.9317	5.8667	.5375
	Std. Deviation	26.99544	.11973	3.15937	.19327
Most Extreme Differences	Absolute	.136	.449	.189	.248
	Positive	.136	.284	.189	.228
	Negative	-.113	-.449	-.144	-.248
Kolmogorov-Smirnov Z		.746	2.461	1.037	1.358
Asymp. Sig. (2-tailed)		.633	.000	.232	.050

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		20.37041558
Most Extreme Differences	Absolute		.091
	Positive		.091
	Negative		-.087
Kolmogorov-Smirnov Z			.499
Asymp. Sig. (2-tailed)			.965

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 7

Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.656 <sup>a</sup>	.431	.365	21.51356	1.402

a. Predictors: (Constant), FINANC, INDEP, MEET

b. Dependent Variable: LAG

Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23.683	32.878		.720	.478		
	INDEP	58.948	34.019	.261	1.733	.095	.962	1.039
	MEET	-4.258	1.318	-.498	-3.231	.003	.921	1.086
	FINANC	-33.277	21.803	-.238	-1.526	.139	.899	1.113

a. Dependent Variable: LAG

Uji R square

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.656 <sup>a</sup>	.431	.365	21.51356

a. Predictors: (Constant), FINANC, INDEP, MEET

b. Dependent Variable: LAG



Lampiran 8

Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9100.206	3	3033.402	6.554	.002 <sup>a</sup>
	Residual	12033.661	26	462.833		
	Total	21133.867	29			

a. Predictors: (Constant), FINANC, INDEP, MEET

b. Dependent Variable: LAG

Uji t

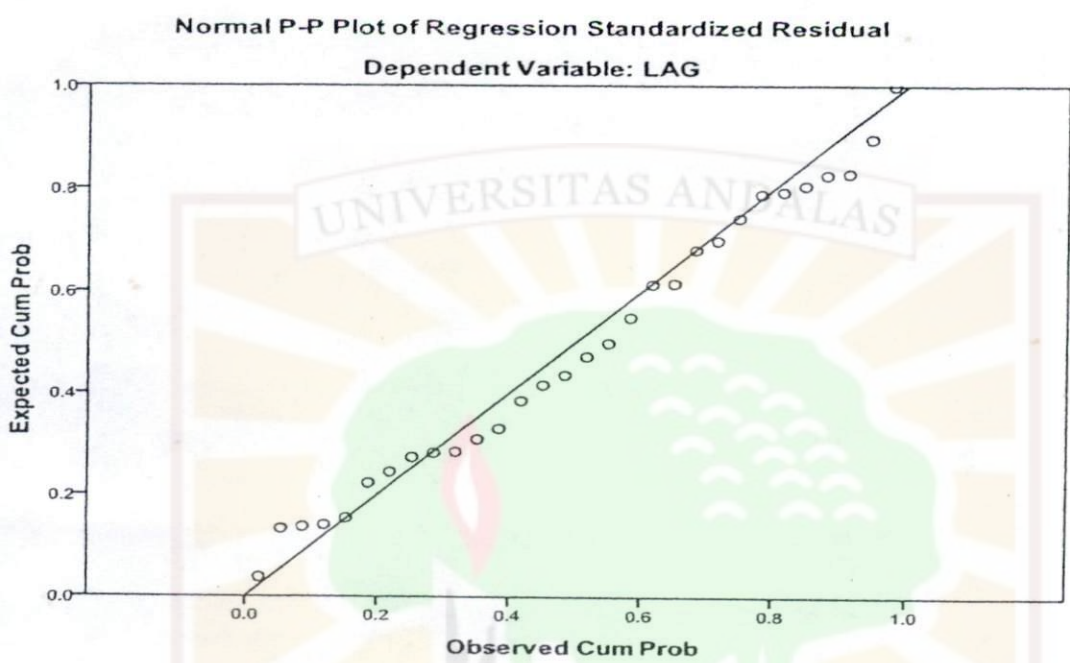
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.683	32.878		.720	.478
	INDEP	58.948	34.019	.261	1.733	.095
	MEET	-4.258	1.318	-.498	-3.231	.003
	FINANC	-33.277	21.803	-.238	-1.526	.139

a. Dependent Variable: LAG

CHART

Normalitas



Heteroskedastitas

